

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmo sudirjo, prajudi. *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Ghalia,1989.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Basah,Sjahan. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Surabaya, 1995.
- Bakri, Muhammad. *Hak Menguasai Tanah oleh Negara*. Yogyakarta: Citra Media,2007.
- Bhakri, Syaiful. *Ilmu Negara dalam Konteks Neagra Hukum Modern*. Yogyakarta:Total media, 2010.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti,2011.
- Effendi, Lufti. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Gautama, Sudargo. *Pengertian Negara Hukum*. Bandung:Alumni, 1973.
- Hartono, Sunaryati .*Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni, 1994.
- HR, Ridwan. *Hukum Admnistrasi Negara*. Jakarta: Rajawali pers, 2016.
- Ismail Suny dan Rudioro Rochmat. *Tinjauan dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit luar Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1972.
- Johan Nasution,Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008..
- Kansil, Christine. *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Manan, Bagir. *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul ditinjau dari perspektif UUD 1945*. Jakarta, 1995.
- _____. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju,1995.

- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Moin, Abdul. *Merger, Akuisisi, dan Divestasi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007.
- M.P. Hutabarat, Samuel. *Sistem Hukum, Globalisasi, dan Keabsahan Kontrak*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Subur, 1991.
- Salim HS, H. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Saleng, Abrar. *Kepastian Hukum dan Status Hukum Pemerintah dalam Kontrak Karya Pertambangan*. Buletin Mimbar Hukum. Soejono dan H. Abdurrahman. *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta, 2015.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*.

REGULASI

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang – Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan nomor 25 tahun 2018 tentang perusahaan pertambangan mineral dan batubara

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Naskah akademik rancangan Undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara

SKRIPSI

Yelik Bambang Daling. “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2013.

Reza Septa Yuwono. “kedudukan hukum Heads of Agreement (HOA) dalam kedudukan sistem hukum Indonesia dan Implikasinya Terhadap Divestasi Saham PT Freeport Indonesia”. *Skripsi*. Jawa Timur : Fakultas Hukum Universitas Airlangga ,2018.

KAMUS

A.Garner, Ryan. *Black Laws Dictionary*, 9 Edition. Thomson Reuters : West Publishing CO,2009.

JURNAL

Ahmad Redi, “Kontrak karya PT Freeport Indonesia dalam perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945”, *Jurnal konstitusi* ,vol 13, 2016.

Asdar Kadir, “Hak Menguasai Negara Atas Tanah Sebagai Dasar Perampasan Hak Perseorangan Atas Tanah (Tinjauan terhadap Pengadaan Hak Atas Tanah Demi Kepentingan Umum)” 2020.

Dola Riza, “Hakikat KTUN menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *sumatera law review*, vol 2 , nomor 2 , 2019.

Edwia Putri, *Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara*, FH UNSRI, 2019.

Emma Cafferky and Sharon McCaffrey, “*Heads of Agreement*”,(2015) Eugene F Collins Corporate Department.

Ismail Saleh,dkk , “Implikasi Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bagi Sektor Pertambangan Batubara”, vol II, nomor 5, 2014.

Khushal Vibhute dan Filipos Aynalem, *Legal Research Methods: Teaching Material, Justice and Legal System Research Institute, 2009.*

Marulak Pardede, “Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan Terhadap Kedaulatan Negara”, *Jurnal penelitian hukum de jure*, 2018.

Monika suhayati, “Perubahan Status Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia”, *Majalah info singkat Hukum*, Vol.IX, No.05, 2017.

Nabila Zulfa Humaira, dkk, “*implikasi yuridis undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap kontrak karya pertambangan antara pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia*”, *diponegoro law journal*, vol 6, nomor 2, 2017.

Stefanous Mouzas dan Michael Furmston, “*From Contract to Umbrella Agreement*”, *Cambridge Law Journal*, 2018.

Tanton Swastika Adi dan Mas Rahmah, “*Heads of Agreement* sebagai instrumen dalam pengambilalihan saham milik PMA oleh PMDN”, Vol.2 No.5, September 2019.

Tengku Erwinsyahbana, Vivi Lia Falini Tanjung, “Kepastian Hukum Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dalam perspektif atas Hak menguasai Negara”, Universitas Muhammadiyah

INTERNET

Abdul Aziz, “Akhir rezim Kontrak karya Freeport”, <https://tirto.id/akhir-rezim-kontrak-karya-freeport-ci5w>

Ady Thea, “Dua pasal UU ciptakerja sektor pertambangan ini dinilai bermasalah”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f8ef080e80a6/dua-pasal-uu-cipta-kerja-sektor-pertambangan-ini-dinilai-bermasalah>

Ambaranie Movanita, “Ini yang bisa terjadi jika kontrak karya Freeport tak diperpanjang hingga 2041”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/22/104514526/ini-yang-bisa-terjadi-jika-kontrak-freeport-tak-diperpanjang-hingga-2041?page=all>

Anitana Puspa, “Freeport: Perubahan dari rezim KK menjadi IUPK memang sudah saatnya”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181221/44/872148/freeport-perubahan-dari-rezim-kk-menjadi-iupk-memang-sudah-saatnya>

Bill Henry, “Heads of Agreement : what are they and are they binding ?”, <
www.turtons.com>

Fiki Ariyanti, Status jadi IUPK, ini kewajiban pajak yang harus diikuti Freeport”,
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2857345/status-jadi-iupk-ini-kewajiban-pajak-yang-harus-diikuti-freeport>

Hendra Friana, ”Presdir Freeport bandingkan keuntungan Kontrak Karya dan IUPK”,
<https://tirto.id/presdir-freeport-bandingkan-keuntungan-kontrak-karya-dan-iupk-ezZo>

H. Syaikhul Islam, “Menggugat Regulasi dan menagih janji PT.Freeport Indonesia”,
<http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Menggugat-Regulasi-Dan-Menagih-Janji-PT-Freport-Indonesia-1435198040.pdf>

Hukum Online, “sah jadi milik Inalum, Kontrak Karya PT. Freeport berubah jadi IUPK”,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1cfeb70dca4/sah-jadi-milik-inalum--kontrak-karya-pt-freeport-berubah-jadi-iupk/>

Indonesia sebagai negara agraris, apa artinya?”, diakses dari
<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/172322669/indonesia-sebagai-negara-agraris-apa-artinya?page=all>

Jamal Ramadan, “Setoran Freeport naik setelah KK diganti IUPK, begini hitungannya”,
<https://kumparan.com/kumparanbisnis/setoran-freeport-naik-setelah-kk-diganti-iupk-begini-hitungannya-1547549545979473976/full>

“Memahami head of agreement dalam proses divestasi saham”,
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/17/135759826/memahami-head-of-agreement-dalam-proses-divestasi-saham-freeport> >

Menteri Jonan : head of agreement itu seperti tunangan,
<https://industri.kontan.co.id/news/menteri-jonan-head-of-agreement-itu-seperti-tunangan>

Samuel Hutabarat, “kontrak Karya dan Head Of Agreement Divestasi Saham PT.Freeport”,
<https://palpres.com/2018/07/kontrak-karya-dan-head-of-agreement-divestasi-saham-pt-freeport/>, 2018

Michael Agustinus, “ Kontrak karya dan IUPK jadi akar masalah Freeport, apa bedanya”,
<https://finance.detik.com/energi/d-3428820/kontrak-karya-dan-iupk-jadi-akar-masalah-freeport-apa-bedanya>.

M. Januar Rizki, “Kepastian Hukum dan Transparansi Pemerintah Soal Akuisisi Freeport dipertanyakan”,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b49eb5a20d6>

9/kepastian-hukum-dantransparansi-pemerintah-soal-akuisisi-freeport-dipertanyakan.

Nanda Putra, “Mencermati posisi Freeport dari UU Minerba, Kontrak Karya, serta MoU”,<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d8b4379df18/mencermati-posisi-freeport-dari-uu-minerba--kontrak-karya--serta-mou/>.

PT. Freeport,”Area Operasi kami”, <https://ptfi.co.id/id/our-operation-areas>.

PT.Freeport, “Smelter”, <https://ptfi.co.id/id/smelter>.

Rekonsiliasi data, sumber daya batubara Indonesia kini 166 miliar ton, cadangan 37 miliar ton” , diakses dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/rekonsiliasi-data-sumber-daya-batubara-indonesia-kini-166-miliar-ton-cadangan-37-miliar-ton>

Saugy Riyandi, “ini beda KK dan IUPK yang bikin panas hubungan Indonesia-Freeport”,<https://www.merdeka.com/uang/iupk-untungan-negara-atau-freeport-ini-penjasannya.html>.

Sekretariat Kabinet,” catatan atas renegotiasi kontrak” , 14 juli 2015, <http://setkab.go.id/catatn-atas-renegoisasi-kontrak/>

Wilda Asmarini, “Cerita gunung emas wabu Rp 200 T yang mau digarap Antam”,<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200923143606-17-188886/cerita-gunung-emas-wabu-rp-200-t-yang-mau-digarap-antam>.